RENCANA KERJA

2024

DINAS KESEHATAN
Provinsi Sulawesi Barat

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS KESEHATAN
Jl. Abd.Malik Pattana Endeng (Kompleks Kantor Gubernur Sulbar) Mamuju 91511

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 154 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
15. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor B-3302/311/2023 tentang Penyampaian Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah sebagai Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Di samping itu juga merupakan tolok ukur dalam menilai pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi);

KETIGA : Ruang Lingkup Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 meliputi Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, UPTD Balai Labkes dan Transfusi Darah;

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan Indikator Kinerja dan Kegiatan yang telah ditetapkan lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ;

KELIMA : Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2043 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan;
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021;
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V Penutup

KEENAM : Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, UPTD Balai Labkes dan Transfusi Darah dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran harus berdasarkan dan atau berpedoman kepada Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023;

KETUJUH : Rencana Kerja ini dapat dilakukan evaluasi dan revisi sepanjang dibutuhkan dan atau diselaraskan dengan situasi dan kondisi serta perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal dan eksternal;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : Juli 2023

Kepala Dinas

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS KESEHATAN

drg. Asran Masdy, M.A.P

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenanan-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dapat selesai dikerjakan.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2013 – 2026, dijadikan sebagai acuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat dan kompleks serta terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan manjadi sangat penting dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di Sulawesi Barat.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024. Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan Rencana Kerja ini .

Mamuju, Juli 2023

Kepala Dinas ,

drg. Asran Masdy, M.A.P

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... *i*

Daftar isi ..... *ii*

Bab I Pendahuluan 1

Bab II Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022 5

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 24

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 38

Bab V Penutup 41

Lampiran *42*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun

perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan *stakeholder* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai *stakeholder* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada APBD T.A 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Barat pada khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;

f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah ;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

l. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

m. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, terkait dengan Program Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan *Millennium Development Goals (MDGs)* ;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tentang Tahap Perencanaan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

o. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

p. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;

q. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;

r. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025 ;

s. Peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

t. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;

u. Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ;

v. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 2024 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan memuat perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 serta untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja 2024 ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan T.A 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Esensi pembangunan berbasil kinerja adalah orientasi untuk mendorong prubahan dengan menggunakan program / kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan, perubahan pada keluaran hasil maupun dampak. Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip good govermance dengan pilar akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandate suatu instansi dalam pelayanan public yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai. Pengukuran kinerja adalah proses di mana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan akusisi yang dilakukan, berdasarkan apa yang diperjanjikan sebelumnya di dalam Perjanjian Kinerja (perkin).

Tujuan Pengukuran kinerja ini adalah :

1. Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan;
2. Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan kepada indikator inputs saja, tetapi yang lebih penting adalah indikator *outputs*, *outcomes*, *benefits*, dan *impacts*;
3. Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diterapkan.

Pengukuran atas pencapaian sasaran dengan menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Rumus 1

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus sebagai berikut :

Realisasi

Persentase pencapaian = ---------- x 100%

rencana tingkat capaian Rencana

Rumus 2

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, rumus sebagai berikut :

Rencana – (Realisasi - Rencana)

Persentase pencapaian = ---------- x 100%

rencana tingkat capaian Rencana

Kriteria penilaian atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, mengikuti modul Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Interpretasi/Kategori Capaian Kinerja
1.	>85-100	Memuaskan
2.	>75 – 85	Sangat Baik
3.	>65 – 75	Baik
4.	>50 – 65	Cukup Baik
5.	>30 – 50	Agak kurang
6.	0 – 30	Kurang

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Tujuan dalam penetapan IKU adalah : (1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajeme kinerja secara baik. (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akutanbilitas kinerja. Pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja pada dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persentase Capaian (Realisasi/ Target)	Kategori
1	Meningkatnya standarisasi kualitas layanan perorangan dan masyarakat	1	Cakupan Mutu Layanan Upaya Kesehatan Perorangan Yang Sesuai Standar	80%	87.62%	109.52%	Memuaskan
		2	Persentase Pemenuhan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan	100%	100 %	100%	Memuaskan
			Persentase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100 %	100%	Memuaskan
			Persentase orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Memuaskan
2	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	3	Jumlah absolut angka kematian ibu	30	54	20%	Kurang

		4	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	7	10	70%	Baik
4	Meningkatnya Pelayanan Gizi Masyarakat	5	Prevalensi Stunting Pada Balita	30%	24,40%	118%	Memuaskan
5	Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular	6	Cakupan Pencegahan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	35%	35%	100	Memuaskan
6	Meningkatnya akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan	7	Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	97%	96,71%	99,70	Memuaskan
7	Meningkatnya standarisasi kualitas layanan perorangan dan masyarakat	8	Cakupan pelayanan layanan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai standar	75%	28%	37,33%	Agak Kurang
8	Meningkatnya sistem informasi kesehatan	9	Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu	95%	83,33%	87.72	Memuaskan
9	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kesehatan	10	Persentase Peningkatan Jenis dan Pemerataan Tenaga Kesehatan	80%	67,35%	68,87	Baik
		11	Persentase Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	75%	59.06%	79,47	Sangat Baik
		12	Persentase Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Terlatih	90%	97,93%	109	Memuaskan

10	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, mamin, alkes dan perbekalan rumah tangga (PKRT)	13	Persentase Layanan Perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Sesuai Standar	100%	100%	100	Memuaskan
		14	Persentase Layanan Perizinan pada Usaha Kecil Obat Tradisional	100%	0%	0	Kurang
		15	Persentase Penggunaan Obat Rasional	95%	86,07%	90,6	Memuaskan
11	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	16	Persentase Kabupaten yang Menetapkan Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan	100%	33.33 %	33.33	Agak kurang
		17	Persentase Kabupaten/kota yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100%	100%	100	Memuaskan
		18	Persentase Desa yang melaksanakan UKBM	80	100%	125	Memuaskan
12	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Dinas Kesehatan	19	Nilai RB Lingkup Dinas Kesehatan	B	B	100	Memuaskan

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Sasaran strategis pertama meningkatnya standarisasi kualitas layanan perorangan dan masyarakat terdiri dari 2 indikator kinerja utama yaitu cakupan mutu layanan upaya kesehatan perorangan yang sesuai standar menunjukkan bahwa target capaian sebesar 80% telah terpenuhi dengan realisasi mencapai 87,62%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan upaya kesehatan perorangan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan dan sesuai dengan harapan. Persentase capaian yang mencapai 109,52% juga menunjukkan bahwa pencapaian lebih tinggi dari target, yang menandakan adanya peningkatan kualitas layanan.

Dari jumlah upaya kesehatan perorangan sebanyak 106, sebanyak 92 di antaranya terakreditasi, yang menandakan bahwa sebagian besar layanan upaya kesehatan perorangan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Namun, masih ada sekitar 14 upaya kesehatan perorangan yang belum terakreditasi dan perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Peningkatan kualitas layanan upaya kesehatan perorangan yang belum terakreditasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain dengan memastikan bahwa protokol pelayanan yang sesuai dengan standar dilaksanakan secara konsisten, mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan layanan, serta melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, analisis kinerja ini juga perlu melihat faktor-faktor penyebab peningkatan kualitas layanan upaya kesehatan perorangan yang terakreditasi. Faktor-faktor ini dapat meliputi perbaikan sistem manajemen mutu, peningkatan ketersediaan fasilitas dan peralatan medis yang memadai, serta peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan layanan.

Perlu diingat bahwa cakupan mutu layanan upaya kesehatan perorangan yang sesuai standar adalah kunci penting dalam memastikan kualitas layanan kesehatan yang bermutu dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja cakupan mutu layanan upaya kesehatan perorangan, serta melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Indikator kedua adalah Persentase Pemenuhan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan yang dibangun oleh 2 indikator pendukung yaitu Persentase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan

akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan dan Persentase orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Target kinerja indikator ini sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator Pemenuhan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan sebesar 100%.

Laporan kinerja yang mencatat bahwa standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan telah tercapai sebesar 100% adalah kabar yang sangat positif. SPM adalah tolak ukur pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang memadai. Terdapat dua indikator untuk SPM Kesehatan, yaitu Persentase pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat kesehatan, akbita bencana dan atau berpotensi bencana, dan persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pertama-tama, indikator persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat kesehatan, bencana, dan/atau berpotensi bencana adalah penting karena di saat-saat seperti itu, kebutuhan akan pelayanan kesehatan meningkat pesat. Kondisi ini seringkali menyebabkan kekurangan pasokan obat-obatan dan tenaga medis, sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan tersedia bagi masyarakat dalam situasi-situasi darurat seperti ini. Jika laporan kinerja mencatat bahwa persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat kesehatan, bencana, dan/atau berpotensi bencana telah mencapai 100%, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai bagi warga yang membutuhkan di saat-saat krisis.

Kedua, indikator persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah sama-sama penting. Pelayanan kesehatan yang memadai juga harus tersedia di luar situasi-situasi darurat, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya penting untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Jika laporan kinerja mencatat bahwa persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya mencapai 100%, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan dalam situasi-situasi non-darurat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja 1 adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan,

Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKMRujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan:

- Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan Kegiatan Sosialiasi Penyusunan SPM Labkes dan TD
- Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak Gugus Pulau, Pelayanan
- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Peralatan Laboratorium Kesehatan
- Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

1) Sasaran strategis kedua Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak terdiri dari 2 indikator kinerja utama yaitu Jumlah absolut angka kematian ibu dan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup.

Terget yang diharapkan untuk di capai pada indikator jumlah absolut angka kematian ibu sebanyak 30 kasus dengan realisasi mencapai 54 kasus. Capaian kinerja indikator ini sebesar 20% dan sangat jauh dari target yang ditetapkan.

Kematian ibu merupakan isu kesehatan yang serius dan perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Hasil rekapitulasi yang di dapatkan terdapat 54 kasus kematian ibu pada tahun 2022 yang tersebar 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah kasus tertinggi terjadi di Majene sebanyak 15 kasus, dan Polewali Mandar memiliki 12 kasus. Sedangkan, jumlah kematian terendah terjadi di Mamasa dengan hanya 3 kasus.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan jumlah kematian ibu yang signifikan antara wilayah di dalam wilayah yang sama. Hal ini menandakan adanya kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai bagi ibu, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki jumlah kematian ibu yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu

mengenai kesehatan reproduksi, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup dengan target sebesar 7 / 1000 KH dan realisasi 10,81/1000 KH. Capaian kinerja indikator ini hanya mencapai 70%.

Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan kegiatan berupa pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2) Sasaran Strategis ketiga Meningkatnya Pelayanan Gizi Masyarakat dengan indikator kinerja Prevalensi Stunting Pada Balita dengan target sebesar 30% dan realisasi kinerja 24,40%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 114%.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dengan indikator input berupa:

- Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapatkan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Gizi sebanyak 500 orang
- Jumlah Desa MARASA yang Mendapatkan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak di 6 Kabupaten
- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Gizi yang Tersusun sebanyak 2 dokumen
- Jumlah Dokumen Hasil Pemutkhiran Data Dan Surveilans Gizi 1 dokumen
- Jumlah Dokumen Mapping Gizi Buruk Dan Gizi Kurang yang Tersusun sebanyak 7 dokumen
- Jumlah Ibu Kekurangan Energi Kronis (KEK) Mendapatkan Pendampingan PelayananKesehatan Gizi di 6 kabupaten
- Jumlah Orang yang Mengikuti Diseminasi Data Gizi 30 orang
- Jumlah Orang yang Mengikuti TOT Fasilitator PAGT (Pelayanan Asuhan Gizi Terpadu) 50 orang
- Jumlah Petugas yang Dilatih Konseling dan Edukasi Gizi 50 orang
- Jumlah Petugas yang Dilatih Mapping Gizi Buruk Dan Gizi Kurang 105 orang
- Jumlah Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah di 6 kabupaten

3) Sasaran strategis ke empat dengan indikator kinerja Terkendalinya penyakit menular dan

penyakit tidak menular dengan target 35% dan realisasi sebesar 35%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100%. Dukungan kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini berupa pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dengan Indikator input berupa bimbingan teknis program penyakit menular dan tidak menular.

4) Sasaran strategis kelima Meningkatnya akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan dengan indikator Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan dengan target 97% dengan realisasi 96,71%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 81,81%

Kegiatan yang mendukung indikator ini berupa pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan indikator input jumlah dokumen e_costing SPM bidang kesehatan kabupaten dan provinsi yang tersusun sebanyak 1 dokumen.

5) Sasaran strategis ke enam Meningkatnya standarisasi kualitas layanan perorangan dan masyarakat dengan target 75% dan realisasi 28%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 37,33%. Dukungan kegiatan untuk pencapaian indikator ini berupa pendampingan fasilitas pelayanan kesehatan dengan indikator input jumlah kabupaten yang mendapatkan fasilitas, Bimibingan Telnis dan Supervisi Pelaksanaan upaya Kesehatan di 6 Kabupaten dan Jumlah petugas yang mendapatkan Peningkatan kapasitas program upaya pelayanan kesehatan sebanyak 300 orang.

6) Sasaran strategis ke tujuh Meningkatnya sistem informasi kesehatan dengan indikator kinerja Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu kinerja. Target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi 83,33%. Capaian kinerja indikator ini mencapai 87,72%.

7) Sasaran strategis ke delapan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kesehatan dengan 3 indikator kinerja utama yaitu Persentase Peningkatan Jenis dan Pemerataan Tenaga Kesehatan dengan target 80% dan realisasi 55,1% dan capaian kinerja sebesar 68,87%. Indikator ke 2 adalah Persentase Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan target 70% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 143%. Indikator ke 3 adalah persentase Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Terlatih dengan terget kinerja 80% dan realisasi 98,93%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 124%.

Dukungan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan dan pembinaan pengawasan sumber daya manusia kesehatan. Indikator input kegiatan dukungan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis bidang kesehatan 453 orang, jumlah tenaga kesehatan dengan jabatan fungsional kesehatan yang mendapatkan uji kompetensi 60 orang dan jumlah jenis dokumen monitoring evaluasi program SDM kesehatan yang tersususn sebenyak 6 dokumen.

8) Sasaran strategis ke sembilan Meningkatnya mutu sediaan farmasi, mamin, alkes dan perbekalan rumah tangga (PKRT) dengan 3 indikator kinerja utama Persentase Layanan Perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Sesuai Standar dengan terget sebesar 100% dan realisasi 100%. Capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. Indikator capaian ke 2 adalah Persentase Layanan Perizinan pada Usaha Kecil Obat Tradisional dengan target sebesar 100% dan realisasi 0%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 0%. Ini di sebabkan karena tidak adanya layanan perizinan yang dikeluarkan pada usaha kecil obat tradisional di Sulawesi Barat. Indikator ke 3 adalah Persentase Penggunaan Obat Rasional dengan target 95% dan realisasi 85%. Capaian kinerja indikator ini mencapai 89,47%. Dukungan kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini adalah Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, penyediaan dan pengelolaan data perizinan pengakuan PBF Cabang dan cabang PAK berbasis eletronik, Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan usaha kecil obat tradisional dan penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin UKOT berbasis elektronik.

Indikator input dukungan indikator ini berupa frekuensi pemenuhan distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan sebanyak 12 kali, jumlah izin pedagang besar farmasi (PBF) dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) yang diterbitkan sebanyak 4 izin, Jumlah industri rumah tangga, pangan yang dibina 30 IRT-P, jumlah pembinaan usaha kecil obat tradisonal berizin yang di awasi 10 usaha dan jumlah kabupaten yang dilaksanakan pemantauan indikator sebanyak 6 kabupaten.

9) Sasaran strategis ke 10 adalah Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dengan 2 indikator kinerja utama yaitu Persentase Kabupaten yang Menetapkan Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan dengan target yang diharapkan sebesar 100%. Realisasi indikator ini sebesar 33% dengan capaian kinerja hanya 33%. Indikator kedua Persentase

Kabupaten/kota yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan target yang ditetapkan sebesar 17% dan realisasi 17%. Capaian kinerja indikator ini sebesar 17%. Kegiatan yang mendukung indikator ini berupa peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi dan penyelenggaran promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Indikator input yang memberikan kontribusi pencapaian indikator kinerja utama antara lain jumlah desa marasa yang mendapatkan pendampingan desa siaga sebanyak 6 desa, Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi lintas sektor bidang kesehatan 54 orang, jumlah orang mendapatkan advokasi kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 4 jenis, dan jumlah petugas kesehatan yang mendapatkan workshop desain grafis dan multi media kesehatan sebanyak 90 orang.

10) Sasaran strategis ke 11 adalah Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Dinas Kesehatan dengan indikator kinerja nilai RB lingkup Dinas Kesehatan dengan target nilai RB yaitu B dan realisasi B. Capaian kinerja indikator ini mencapai 100%.

Dari tabel dan analisis tersebut diatas terlihat bahwa tahun 2022, dari 19 indikator kinerja utama (IKU) dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 7 indikator yang tidak mencapai target yang telah tetapkan. IKU yang pencapaiannya dibawah target, yaitu:

1) Jumlah absolut angka kematian Ibu dengan capaian kinerja 20%
2) Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 70%
3) Cakupan pelayanan layanan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai standar dengan capaian kinerja 37,33%
4) Persentase Peningkatan Jenis dan Pemerataan Tenaga Kesehatan dengan kinerja 68%
5) Persentase Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kinerja 79%
6) Persentase Layanan Perizinan pada Usaha Kecil Obat Tradisional dengan capaian kinerja 0%
7) Persentase Kabupaten yang Menetapkan Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan dengan capaian kinerja 33,33%

Perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dengan target kinerja sebesar 100%. Terdapat 2 standar pelayanan minimal bidang kesehatan ditingkat provinsi yaitu terkait KLB dan penanganan krisis kesehatan. Pada tahun 2020 yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dengan capaian kinerja 100%. Semua kasus KLB di Sulawesi Barat pada tahun 2022 dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam oleh petugas kesehatan. Capaian kinerja indikator ini sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 100%.
2) Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 81,71%. Capaian ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 99,70 %. Target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 90% penduduk Sulawesi Barat mendapatkan jaminan kesehatan melalui SJSN dan terealisasi sebesar 96,71%.

Beberapa penyebab dari permasalahan tidak tercapaianya indikator kinerja program tersebut diatas antara lain :

1) Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program belum semuanya bersinergi.
2) Perencanaan anggaran program dan kegiatan belum berbasis capaian indicator kinerja tahun anggaran.
3) Keterbatasan anggaran dalam mencapai indicator kinerja
4) Kesinambungan program antara bidang maupun program yang ada di dinas kabupaten belum optimal.

Solusi yang akan dilakukan pada berikutnya antara lain :

1) Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan harus lebih ditingkatkan dana diperbaiki antara pengelola program baik OPD dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten.
2) Penyusunan program dan kegiatan yang lebih sensitive, aplikatif, tepat, jelas outcome dan memiliki daya ungkit yang signifikan serta bersinergi antara program / kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.

rogram berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1	Meningkatnya standarisasi kualitas layanan perorangan dan masyarakat	Cakupan Mutu Layanan Upaya Kesehatan Perorangan Yang Sesuai Standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	35,714,019,330	30,258,999,038	84.73	
		Persentase Pemenuhan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan					
		Persentase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan					

		kesehatan					
		Persentase orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar					
2	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah absolut angka kematian ibu					
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup					
4	Meningkatnya Pelayanan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting Pada Balita					
5	Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular	Cakupan Pencegahan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular					

6	Meningkatnya akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan	Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan					
7	Meningkatnya standarisasi kualitas layanan perorangan dan masyarakat	Cakupan pelayanan layanan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai standar					
8	Meningkatnya sistem informasi kesehatan	Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu					
9	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Jenis dan Pemerataan Tenaga Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	65,090,080	57,467,000	88.29	
		Persentase Peningkatan Mutu dan Kompetensi					

		Sumber Daya Manusia Kesehatan					
		Persentase Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Terlatih					
10	Meningkatnya mutu sediaan farmasi, mamin, alkes dan perbekalan rumah tangga (PKRT)	Persentase Layanan Perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Sesuai Standar	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	95,752,600	74,287,100	77.58	
		Persentase Layanan Perizinan pada Usaha Kecil Obat Tradisional					
		Persentase Penggunaan Obat Rasional					

11	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Persentase Kabupaten yang Menetapkan Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	888,501,980	819,763,388	92.26	
		Persentase Kabupaten/kota yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat					
		Persentase Desa yang melaksanakan UKBM					
12	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Dinas Kesehatan	Nilai RB Lingkup Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16,324,871,548	16,095,949,453	98.60	

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 53.088.235.538 dengan realisasi anggaran sebesar 47,306,467,979 (89,11%). Rincian alokasi anggaran dinas kesehatan tahun 2022 berdasarkan program adalah sebagai berikut:

- Program penunjang urusan pemerintah daerah Rp. 16,324,871,548 dengan realisasi Rp. 16,095,949,453
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Rp 35,714,019,330 dengan realisasi Rp. 30,258,999,038
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Rp. 65,090,080 dengan realisasi 57,469,000
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Rp. 95,752,600 dengan realisasi Rp. 74,287,100
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Rp. 888,501,980 dengan realisasi Rp. 819,763,388

Jumlah anggaran Dinas Kesehatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 88,417,375,814.31.

Untuk mewujudkan target capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, tentunya dibutuhkan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang upaya pencapaian target sasaran strategis.

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah pembangunan kesehatan masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan anggaran yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Dalam pelayanan di bidang Kesehatan, peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), yang menempatkan periode 2015-2019 sebagai tahapan ketiga untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

2. Undang-undang nomor 26 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia.
3. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat dengan pembangunan kesehatan nasional.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat
5. Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Sulawesi Barat tahun 2017–2022

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yang meliputi Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta Pelayanan dan Sumber Daya.

Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1),

menyelenggarakan fungsi:

a penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan;

b memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

c penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

d penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;

e pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Sulawesi Barat;

f penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;

g penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;

h penyelenggaraan koordinasi dan membina UPTD;

i penyelenggaraan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka menyelenggarakan pelayanan umum di bidang kesehatan;

j penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota;

l penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

m pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenagan.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah, terdiri atas:

a Sekretariat;

b Bidang Kesehatan Masyarakat;

c Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan

d Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Setia Kepala Bidang membawahi 2 (2) Kepala Seksi sesuai bidangnya yang didalamnya terdiri atas jabatan fungsional kesehatan dan jabatan pelaksana Sedangkan Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan fungsional perencana kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dan hubungan koordinasi dengan bidang lain yaitu UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Unit Transfusi Darah.

Dalam Pergub tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan;
b. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
d. penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;
e. pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Sulawesi Barat;
f. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
g. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;
h. penyelenggaraan koordinasi dan membina UPTD;
i. penyelenggaraan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka menyelenggarakan pelayanan umum dibidang kesehatan;
j. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota; dan penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas dan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
   a. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan di Provinsi;
   b. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;
   c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugastugas dibidang kesehatan;
   d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas,
   e. Menyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD
   f. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan di

Provinsi;

g. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
h. Menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
i. Menyelenggarakan fasiiitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber caya kesehatan;
j. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Provinsi Sulawesi Barat;
k. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
l. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;
m. Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
n. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesehatan;
o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. Menyelenggarakaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota;
q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Sekretariat

a. penyelenggara koordinasi perencanaan dan program dinas;
b. penyelenggara pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
c. pengelola urusan keuangan, kepegawaian, umum, hukum dan hubungan masyarakat.
d. penyelenggara pengkajian dan koordinasi perencanaan program dinas;
e. penyelenggara perencanaan dan program kesekretariatan;
f. penyelenggara pengelolaan administrasi keuangan;
g. penyelenggara pengkajian anggaran dan belanja;
h. penyelenggara pengendalian administrasi belanja;
i. penyelenggara pengelolaan administrasi kepegawaian;
j. penyelenggara penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
k. penyelenggara pengelolaan data dan informasi kesehatan
l. penyelenggara pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
m. penyelenggara penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
n. penyelenggara pengkajian bahan Rencana Strategis, Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (SAKIP), LPPD, LKPJ dinas;

o. penyelenggara pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
p. penyelenggara monitoring dan evaluasi;
q. penyelenggara pembinaan jabatan fungsional;
r. penyelenggara koordinasi dengan unit kerja terkait;
s. penyelenggara telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat
   a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
   b. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi dibidang kesehatan masyarakat;
   c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi dan pemberdayaan kesehatan;
   d. penyelenggaraan kerja sama bidang kesehatan masyarakat dengan bidang lain;
   e. penyelenggaraan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di kabupaten/kota;
   f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang kesehatan masyarakat;
   g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
   h. pelaksanaan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
   i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
   j. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
   k. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
   l. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
   m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
   a. penyusun rencana tahunan dan lima tahunan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan;
   b. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   c. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
   d. pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan bidang pelayanan dan sumber daya

manusia kesehatan bidang pelayanan kesehatan.

e. pelaksanaan pembinaan terhadap mutu bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan upaya pelayanan kesehatan.
f. pelaksanaan monitoring evaluasi, bimbingan teknis dan pengendalian bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan pelayanan kesehatan.
g. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training);
h. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan
i. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan sesuai bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan;
k. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
m. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengendalian Penyakit

a. penyelenggaraan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
c. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Penyelenggaraan rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengamatan penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi;
f. pelaksanaaan surveilens epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;
g. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
h. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training);
i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan;
j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD Pelayanan Kesehatan

a. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan sederhana kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya serta masyarakat di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Barat;

b. Melaksanakan perencanaan, penyediaan obat-obatan, alat dan bahan pemeriksaan kesehatan;

c. Melaksanakan pelaporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

d. Melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan yaitu pelayanan kesehatan dasar berupa:

(1). Konsultasi, penyuluhan, peemriksaan medis dan pengobatan

(2). Pemeriksaan, pengobatan, termasuk pencabutan dan tambal gigi

(3). Tindakan medis kecil/sederhana

(4). Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana

(5) Pengobatan efek samping kontrasepsi

(6) Pemberian obat pelayanan dasar dan bahan kesehatan habis pakai

(7) Pemeriksaan kehamilan dan persalinan

(8) Pelayanan imunisasi dasar

e. Merencanakan dan menyediakan kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan laboratorium;

f. Melaksanakan pelaporan pelayanan kesehatan dasar

g. Melaksanakan ketatausahaan

h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelayanan unit pelaksana teknis dinas;

i. Melaksanakan pengolahan data program pelayanan unit pelaksana teknis dinas di sarana pelayanan kesehatan dasar;

j. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan akses dan kualitas pelayanan unit pelaksana teknis dinas, meliputi Sub Bagian Tata Usaha

k. Melaksanakan fasilitasi penerapan kebijakan pelayanan unit pelaksana teknis dinas;

l. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan unit pelaksana teknis dinas disarana pelayanan kesehatan dasar;

m. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. Melaksanakan monitoring dan hasil Evaluasi unit pelaksana teknis dinas.

Struktur Organisasi

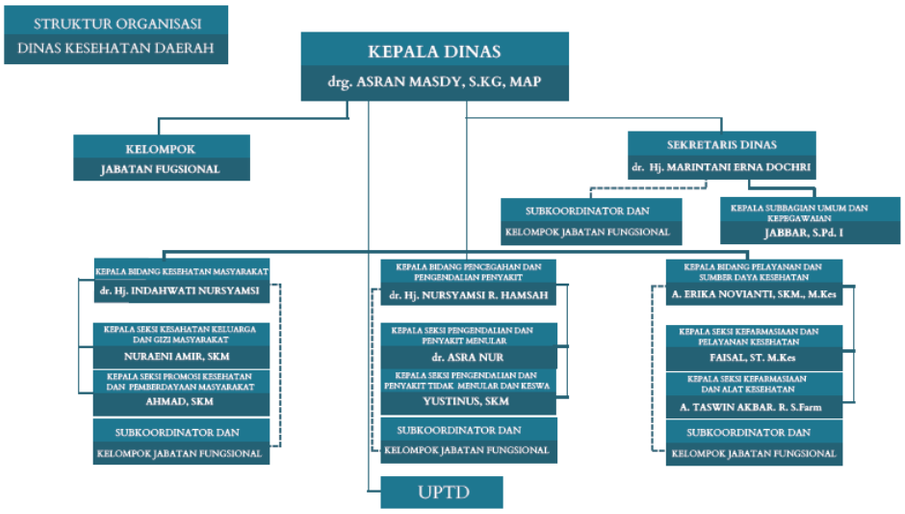

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS KESEHATAN

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, SGG's dan RAD PG) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi masalah yang aktual di di Provinsi Sulawesi Barat (AKI: 54 kasus Kematian; AKB: 303 kasus kematian). Kasus Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dibandingkatn tahun 2021 sebesar 46 kasus kematian ibu pada tahun 2022.

Kabupaten Majene memiliki kasus kematian sebanyak 12 kasus kematian, Polewali Mandar 12 kasus, Mamuju 10 Kasus, Mamuju Tengah dan mamuju Utara 7 Kasus dan Mamasa sebanyak 3 kasus kematian ibu.

Penurunan AKI di Sulawesi Barat walaupun masih tinggi disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mampunya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi.

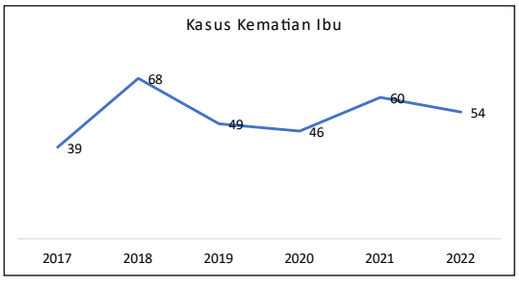

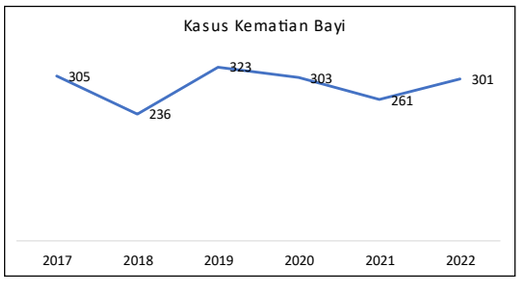

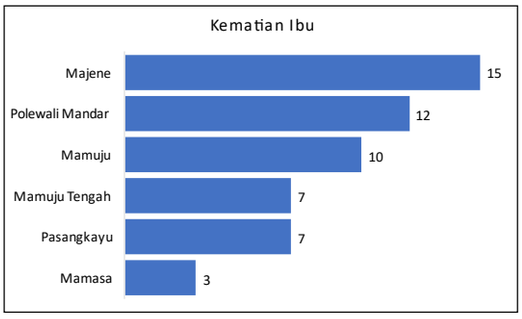

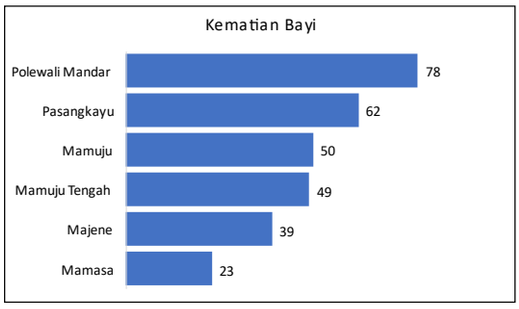

Kejadian kasus kematian bayi mengalami peningkatan dari 261 kasus kematian bayi pada tahun 2021 menjadi 301 kasus kematian pada tahun 2022. Kematian bayi terbanyak terjadi di kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah 78 kasus dan Pasangkayu 62 kasus. Kasus kematian bayi terendah di kabupaten Mamasa dengan jumlah kasus kematian 23 kasus.

Penyebab kejadian kematian bayi antara lain asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), Asfiksia, infeksi, kelainan kongenital, infeksi, tetanus neonatorium dan lain – lain. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif.

2. Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan

Akses terhadap fasilitas kesehatan dengan situasi dan kondisi geografis merupakan tantangan yang cukup besar didalam pemberian pelayanan Kesehatan secara merata di Sulawesi Barat. Diperlukan upaya dan peran serta pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas kesehatan terutama fasilitas upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang berkualitas untuk meningkatkan cakupan Pelayanan Kesehatan yang Malaqbi.

Selain itu perlu Perubahan paradigma kesehatan yang lebih menekankan pada upaya promotif-preventif dibandingkan dengan upaya kuratif dan rehabilitatif diharapkan merupakan titik balik kebijakan Provinsi Sulawesi Barat dalam menangani kesehatan penduduk yang berarti program kesehatan yang menitikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa bukan sekedar penyembuhan penyakit. Upaya kesehatan di masa datang harus mampu menciptakan dan menghasilkan SDM Sulawesi Barat yang sehat produktif sehingga obsesi upaya kesehatan harus dapat mengantarkan setiap penduduk memiliki status kesehatan yang cukup.

AKREDITASI PUSKESMAS

Jumlah Puskesmas : 98
Puskesmas Terakreditasi : 85

JENIS AKREDITASI

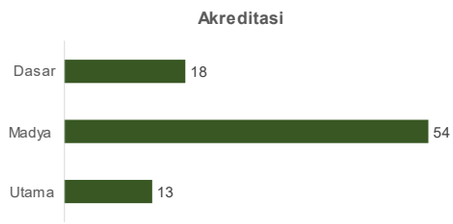

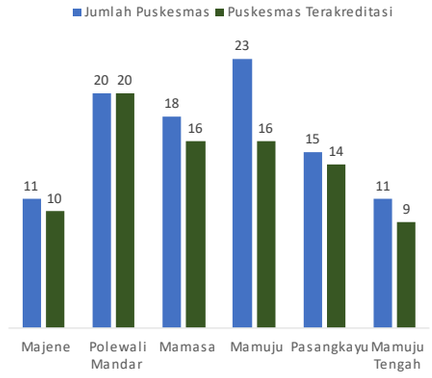

Sejak tahun 2017 untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten melakukan standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas yang merupakan program dari Kementerian kesehatan.

Pada akhir tahun 2022 sebanyak 85 dari 98 (86,7%) puskesmas telah melakukan akreditasi. Akreditasi Puskesmas di Sulawesi Barat berada dalam kategori Madya sebanyak 54 Puskesmas, Dasar 18 Puskesmas dan utama 13 Puskesmas. Adapun sebanyak 13 belum terakreditasi yang tersebar di 5 kabupaten kecuali Polewali Mandar.

3. Gizi Stunting pada Balita

Hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilansir Menteri Kesehatan menunjukkan prevalensi "stunting" anak Balita di Sulawesi Barat mencapai 35 persen. "Angka ini merupakan angka tertinggi kedua provinsi dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk memberikan perhatian khusus untuk mengantipasi pertambahannya. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 sebesar 40,38%.

PREVALENSI STUNTING SULAWESI BARAT

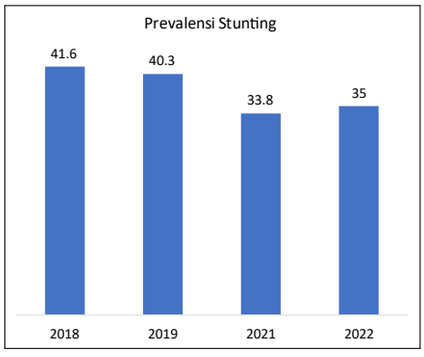

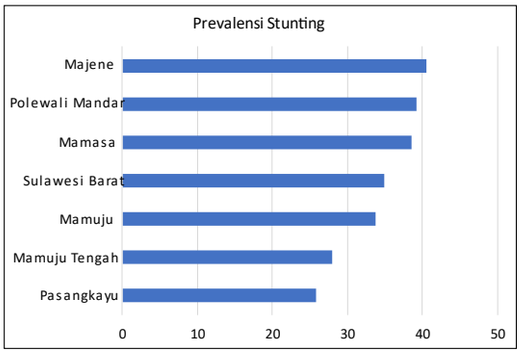

"Kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kejiwaan anak, sehingga jika anak sehat tentu akan menyebabkan jiwanya jugas sehat. Fakta lainnya, tingginya prevalensi anak stunting telah memposisikan Sulawesi Barat ke dalam lima besar Provinsi masalah stunting.

Masalah gizi, khususnya anak pendek ,menghambat perkembangan anak muda, dengan dampak

negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya. Studi yang ada menunjukkan bahwa anak pendek sangat berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk, lama pendidikan yang menurun dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa. Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan miskin, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu, anak pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.

Untuk mengatasi masalah gizi, khususnya anak pendek, diperlukan aksi lintas sektoral. Asupan makanan yang tidak memadai dan penyakit – yang merupakan penyebab langsung masalah gizi ibu dan anak - adalah karena praktek pemberian makan bayi dan anak yang tidak tepat dan, penyakit dan infeksi yang berulang terjadi, perilaku kebersihan dan pengasuhan yang buruk. Pada gilirannya, semua ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan dan pengetahuan pengasuh anak, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, keterbatasan akses ke pangan dan pendapatan yang rendah.

4. Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan tidak menular Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi.

Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB Paru disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit. Jumlah kasus DBD yang masih tinggi, dikarenakan iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang banyak yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes aegipty serta tidak maksimalnya kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit. Penyakit-penyakit menular/ infeksi masih menjadi masalah di masyarakat, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus (DM), kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) cenderung meningkat.

5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

GERMAS dilakukan sebagai penguatan upaya promotif dan preventif masyarakat. Tujuan GERMAS, antara lain: 1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk 3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. Prinsip GERMAS, yaitu Kerjasama multisektor; Keseimbangan masyarakat; keluarga dan individu; Pemberdayaan masyarakat; 4) Penguatan sistem kesehatan; Pendekatan siklus hidup; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan berfokus pada pemerataan layanan

Gerakan ini akan dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta deteksi dini penyakit tidak menular (PTM). Kebijakan lainnya adalah Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga, dilaksanakan oleh Puskesmas yang mempunyai ciri

1) Sasaran utama adalah Keluarga; 2) Diutamakan Promotif dan Preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); 3) Kunjungan rumah secara aktif untuk peningkatan outreach dan total coverage; 4) Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach.

6. Jaminan kesehatan masih kurang;

Sulawesi Barat bertujuan membuat akses kesehatan yang sama bagi semua penduduknya dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau kita lihat, saat ini capaian kepesertaan di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 82,83 persen.

Capaian belum mencapai target Universal Health Coverage. Kondisi ini terjadi karena keterbasan anggaran daerah. Kontribusi terbesar dari jaminan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat adalah orang miskin dan yang paling sedikit adalah para pekerja Non formal melalui JKN Mandiri. Harusnya para pekerja mandiri bisa lebih banyak ikut agar bisa subsidi silang dalam konteks biaya.

Ada dua alasan untuk mengikutsertakan masyarakat miskin dalam jaminan kesehatan nasional. Yang pertama, hal ini memenuhi hak konstitusi. Yang kedua, untuk kebijakan kesehatan nasional, penting untuk memastikan kesehatan masyarakat miskin. Kalau kita lihat faktor-faktor yang membuat indikator kesehatan Indonesia buruk itu adalah masyarakat miskinnya. Kontribusi masyarakat miskin yang berada di 20% terendah pada indikator kesehatan nasional Indonesia itu tiga sampai empat kali dibanding masyarakat non-miskin. Kalau kita ingin cepat meningkatkan angka nasional kita yang buruk, yang kita perlu naikkan adalah aksesibilitas kesehatan kesehatan bagi masyarakat miskin agar jumlah mereka yang berkontribusi tiga sampai empat kali itu akan cepat turun.

Skema partisipasi ini akan menjadi wajib bagi semua masyarakat dan semua turut membayar. Bagi masyarakat miskin, maka yang membayar adalah negara. Kalau seluruh masyrakat ikut serta dalam skema jaminan kesehatan nasional tetapi dari yang swasta belum ikut, maka mereka dari pihak swasta juga akan ikut serta karena tekanan dari sistem atau pasar.

Pelayanan yang diberikan kepada yang miskin dan tidak miskin adalah sama dan mencakupi segala jenis penyakit dari panu sampai penyakit jantung. Yang berbeda adalah pelayanan tambahan, misalnya apakah mau kamar dengan penyejuk ruangan atau tidak. Namun, orang yang di kelas tiga sekalipun mau operasi jantung terbuka tidak masalah. Hal ini menyebabkan pengeluaran biaya oleh BPJS menjadi sangat besar karena kemurahan hati pemerintah. Namun ini resiko dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu ada subsidi silang dan kelompok produktif yang belum ikut serta dalam BPJS harus ikut.

8. Akses terhadap sanitasi yang layak.

Keadaan sanitasi dan higiene, khususnya kebiasaan buang air besar dan cuci tangan pakai sabun, telah terbukti secara meyakinkan berpengaruh terhadap stunting. Dari sisi perilaku pengolahan air di rumah tangga.

Persepsi masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan masih belum menjadi kebutuhan, dilihat dari masih banyak ditemuinya praktek buang air besar (BAB) di sembarang. Terkait upaya mencapai 100% akses sanitasi layak di Indonesia. Peran aktif pemerintah daerah dan stakeholder

lainnya sangat penting untuk mencapai target akses sanitasi layak.

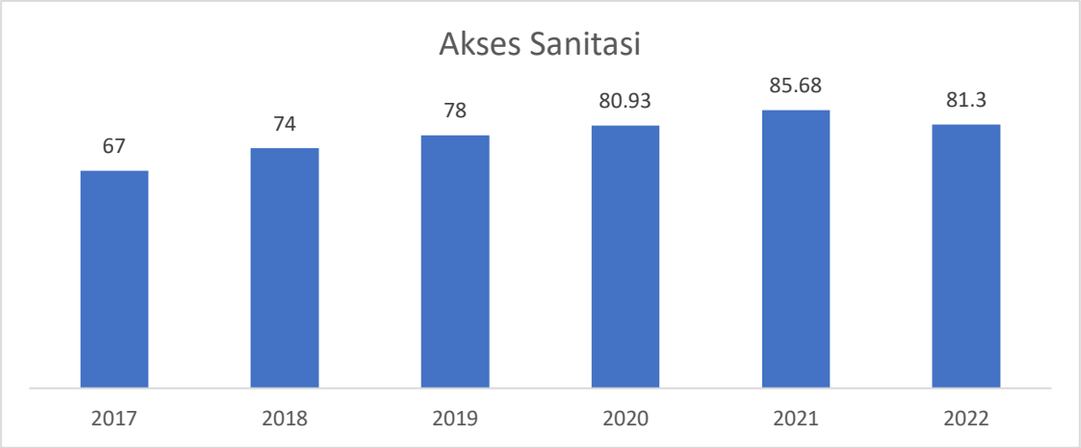

Pada tahun 2022 akses sanitasi Provinsi Sulawesi Barat sebesar 81,3%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang berada pada kisaran 85,68%. Selain itu jumlah desa Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Untuk kelancaran dan keberhasilan program tersebut, diperlukan keterlibatan beberapa pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun. Sanitasi membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Peran serta para pemangku kepentingan lainnya dalam hal penyediaan lahan, penganggaran biaya operasional dan pemeliharaan, penyiapan kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta pendampingan dan pengawasan terhadap keberlanjutan infrastruktur sanitasi.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja 2024 adalah sebagai berikut :

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

e Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7 Penyediaan Bahan/Material
8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
3 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
5 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
6 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
7 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
8 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
9 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan
10 Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

b Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
11 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
12 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
13 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
14 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
15 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
16 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
17 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
18 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
19 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
20 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
21 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

c Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

d Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

a **Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**
   1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   2 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
b **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**
   1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
   2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

a **Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**
   1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
   2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
b **Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**
   1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
   2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik

5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

a **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**
   1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
b **Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**
   1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
   2 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
c **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**
   1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta anggarannya terlampir pada bagian akhir dokumen rencana kerja ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. Rencana Kerja merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem nasional lainnya dalam suatu supra sistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan. Oleh karena itu tidak tertutup terhadap penyesuaian dan penyempurnaan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat bergantung pada semangat, dedikasi, ketekunan, kerja keras, kemampuan dan ketulusan para penyelenggara, serta sangat bergantung pula pada petunjuk, rahmat, dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

LAMPIRAN

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**56,483,764,493.00**							**0.00**	
	102	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**56,483,764,493.00**							**0.00**	
1	**10201**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**17,765,096,987.00**							**0.00**	**Dinas Kesehatan**
			Nilai SAKIP Lingkup OPD (poin)				***665***									
			Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persentase)				***85***									
			Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (poin)				***76***									
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persentase)				***85***									
	10201101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278,602,850.00							-	Dinas Kesehatan
			Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (poin)				*80*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*80*		
			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD (poin)				*80*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*80*		
	102011010001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20,271,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0*	*0*	*2*		*(Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*					*0*		
			Penyusunan Rencana Kerja (Dokumen)				*2*	*20,271,000.00*	*(Dinkes Prov Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Prov Sulbar*			
	102011010002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						30,080,850.00					Dinkes Prov Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1*		*(Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*				*Dinkes Prov Sulbar*	*0*		
			Penyusunan RKA (Dokumen)				*1*	*30,080,850.00*	*(Dinkes Prov Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Prov Sulbar*			
	102011010003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						31,832,300.00					Dinkes Prov Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1*		*(Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*				*Dinkes Prov Sulbar*	*0*		
			Penyusunan RKA Perubahan (Dokumen)				*1*	*31,832,300.00*	*(Dinkes Prov Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Prov Sulbar*			
	102011010004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						20,144,400.00					Dinkes Prov Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1*		*(Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*				*Dinkes Prov Sulbar*	*0*		
			Penyusunan DPA (Dokumen)				*1*	*20,144,400.00*	*(Dinkes Prov Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Prov Sulbar*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	102011010005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						19,879,600.00					Dinkes Prov Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1*		*(Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*				*Dinkes Prov Sulbar*	*0*		
			Penyusunan DPA Perubahan (Dokumen)				*1*	*19,879,600.00*	*(Dinkes Prov Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Prov Sulbar*			
	102011010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						126,283,750.00					Dinkes Prov Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0*	*0*	*2*		*(Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*				*Dinkes Prov Sulbar*	*0*		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*2*	*126,283,750.00*	*(Dinkes Prov Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Prov Sulbar*			
	102011010007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30,110,950.00					Dinkes Prov Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0*	*0*	*2*		*(Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*				*Dinkes Prov Sulbar*	*0*		
			Honor Operator e-Monev (Bulan)				*12*	*3,200,000.00*	*(Dinkes Prov Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Prov Sulbar*			
			Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban SKPD (Laporan)				*2*	*10,855,750.00*	*(Dinkes Prov Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Prov Sulbar*			
			Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan (Laporan)				*2*	*16,055,200.00*	*(Dinkes Prov Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Prov Sulbar*			
	10201102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15,482,573,887.00							-	Dinas Kesehatan
			Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persentase)				*97*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*97*		
	102011020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15,365,096,987.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		*0*	*0*	*132*		*(Dinas Kesehatan Prov Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*					*0*		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*132*	*15,365,096,987.00*	*(Dinkes Prov Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Prov Sulbar*			
	102011020004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						28,569,750.00					Dinkes Prov Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinkes Prov Sulbar*			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*4*	*28,569,750.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011020005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						12,439,250.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*4*	*12,439,250.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	102011020006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						48,178,000.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*5*	*48,178,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011020007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						28,289,900.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*4*	*28,289,900.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	10201103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						36,571,500.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persentase)				*90*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*90*		
	102011030003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						27,081,500.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0*	*0*										
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*27,081,500.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011030006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						9,490,000.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*2*	*9,490,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	10201105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						185,890,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persentase)				*100*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*100*		
	102011050009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						152,486,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0*	*0*										
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)				*17*	*152,486,000.00*	*(Luar Daerah, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Lingkup Dinkes Sulbar*			
	102011050010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						33,404,000.00					Pegawai Lingkup Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0*	*0*							*Pegawai Lingkup Dinkes Sulbar*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kali)				*1*	*33,404,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	10201106	Administrasi Umum Perangkat Daerah						513,634,900.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persentase)				*100*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*100*		
	102011060001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						13,870,400.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*										
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*13,870,400.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011060002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						122,217,287.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*	*122,217,287.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011060003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						24,662,400.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*1*	*24,662,400.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011060004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						54,480,000.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*	*54,480,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011060005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24,443,500.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*	*24,443,500.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011060006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						20,180,000.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)				*1*	*20,180,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011060007	Penyediaan Bahan/Material						48,170,900.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Penyediaan Bahan/Material (Paket)				*1*	*48,170,900.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	102011060009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						205,610,413.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dalam dan Luar Daerah) (Laporan)				*15*	*205,610,413.00*	*(Luar Daerah; 6 Kabupaten, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	10201107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						98,889,900.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)				*93*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*93*		
	102011070010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						98,889,900.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*										
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)				*1*	*98,889,900.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	10201108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						865,133,500.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)				*95*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*95*		
	102011080001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						157,530,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0*	*0*										
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*157,530,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011080002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						521,080,500.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*3*	*521,080,500.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011080004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						186,523,000.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				*2*	*186,523,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	10201109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						303,800,450.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)				*93*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*93*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	102011090001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						73,150,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0*	*0*										
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*1*	*73,150,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kendaraan Dinas Jabatan*			
	102011090002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						80,984,450.00					Kendaraan Dinas Jabatan		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0*	*0*							*Kendaraan Dinas Jabatan*			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				*12*	*80,984,450.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kendaraan Dinas Operasional*			
	102011090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24,790,000.00					Kendaraan Dinas Operasional		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0*	*0*							*Kendaraan Dinas Operasional*			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*15*	*24,790,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
	102011090009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						124,876,000.00					Dinkes Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0*	*0*							*Dinkes Sulbar*			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bangunan Gedung)				*3*	*124,876,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Sulbar*			
2	**10202**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**34,362,141,000.00**							**0.00**	**Dinas Kesehatan**
			Jumlah Kematian Ibu (Kasus)				***46***						***Dinkes Sulbar***			
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi (Persentase)				***100***						***Dinkes Sulbar***			
			Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) (Angka)				***756***						***Dinkes Sulbar***			
			Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Persentase)				***60***						***Dinkes Sulbar***			
			Prevalensi Balita Wasting (Persentase)				***6***						***Dinkes Sulbar***			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi (Persentase)				***9444***						***Dinkes Sulbar***			
			Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan (Persentase)				***9423***						***Dinkes Sulbar***			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakredatasi (Persentase)				***9444***						***Dinkes Sulbar***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Persentase)				***100***						***Dinkes Sulbar***			
			Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular (Persentase)				***64***						***Dinkes Sulbar***			
	10202101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						6,000,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Layanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi Darah Yang Sesuai Standar (Persentase)				*50*		*(Labkesda dan UTD, SULAWESI BARAT)*					*50*		
			Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Tranfusi (Nilai Akreditasi)				*Skor 75 - 89*		*(Labkesda dan UTD, SULAWESI BARAT)*					*Skor 75 - 89*		
			Persentase Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Persentase)				*32*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*32*		
			Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Telemedicine Sesuai Standar (Persentase)				*257*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*257*		
			Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Kali)				*12*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*12*		
			Persentase Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20% (Persentase)				*100*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*100*		
	102021010004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						3,130,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)		*0*	*0*										
			Akreditasi Labkesda Transfusi Darah (Paket)				*1*	*100,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD*			
			Fasilitasi Poliklinik (Paket)				*1*	*500,000,000.00*	*(Poliklinik, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Poliklinik*			
			Hibah Palang Merah Indonesia (Paket)				*1*	*800,000,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PMI Sulbar*			
			Honorarium Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Dokter Umum (Tahun)				*1*	*210,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Dokter Umum*			
			Honorarium Tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan dan Analis Kimia (Tahun)				*1*	*80,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Pranata Labkesda dan Analis Kimia*			
			Jasa Pelayanan Tenaga Laboratorium dan UTD (Tahun)				*1*	*200,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*SDM lingkup Labkesda*			
			Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa (Kegiatan)				*1*	*30,000,000.00*	*(RSJ daerah lain, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*RSJ Daerah Lainnya*			
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM (Orang)				*38*	*85,000,000.00*	*(UPTD Labkesda dan Transfusi Darah, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*SDM Labkesda*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembangunan Rumah Sakit Jiwa (Paket)				*1*	*1,000,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Rumah Sakit Jiwa*			
			Pengurusan Perijinan Laboratorium dan Transfusi Darah (Dokumen)				*1*	*50,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD*			
			Supervisi dan Monitoring Laboratorium Kesehatan Se Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten)				*6*	*75,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Fasyankes*			
	102021010010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						1,100,000,000.00					Fasyankes		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)										*Fasyankes*			
			DINKES - Pengadaan Sarana dan Prasarana Krisis Kesehatan (Paket)				*1*	*30,000,000.00*	*(Kecamatan , Kelurahan/Desa, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Pengadaan Sarana dan Prasarana Krisis Kesehatan (Paket)				*1*	*70,000,000.00*	*(Kecamatan mamasa, Kelurahan/Desa buntubuda, KAB MAMASA)*							
			Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah (Paket)				*1*	*1,000,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD*			
	102021010020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						30,000,000.00					Labkesda dan UTD		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)		*0*	*0*						*Labkesda dan UTD*			
			Monitoring Evaluasi Telemedicine (Unit)				*12*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
	102021010025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						135,000,000.00					Puskesmas		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Puskesmas*			
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)				*12*	*75,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Kabupaten Fasyankes*			
			Monitoring dan Evaluasi Keteresediaan Obat Dan Vaksin (Kali)				*6*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Kabupaten*			
			Monitoring dan pengawasan penggunaan obat rasional (POR) (Kali)				*6*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinkes Kabupaten*			
	102021010027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						430,000,000.00					Dinkes Kabupaten		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)										*Dinkes Kabupaten*			
			DINKES - Pengadaan Obat-Obatan Krisis Kesehatan (Paket)				*1*	*50,000,000.00*	*(Kecamatan Bambang, Kelurahan/Desa Sikamase, KAB MAMASA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat terdampak Krisis Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemusnahan Obat (Kegiatan)				*1*	*100,000,000.00*	*(Gudang Farmasi, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gudang Farmasi*			
			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Paket)				*1*	*250,000,000.00*	*(Gudang Farmasi Provinsi, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Gudang Farmasi Kabupaten*			
			Rapat Koordinasi Program (Paket)				*1*	*30,000,000.00*	*(Luar Daerah; 6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dalam dan Luar Daerah*			
	1020210111	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						250,000,000.00					Dalam dan Luar Daerah		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*							*Dalam dan Luar Daerah*			
			Pengadaan Pagar Laboratorium dan Transfusi Darah (Paket)				*1*	*250,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD*			
	1020210112	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						60,000,000.00					Labkesda dan UTD		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*							*Labkesda dan UTD*			
			Pengadaan Alat Kebersihan (Paket)				*1*	*30,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD*			
			Pengadaan Media Promosi (Paket)				*1*	*30,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD*			
	1020210114	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)						740,000,000.00					Labkesda dan UTD		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*							*Labkesda dan UTD*			
			Pengadaan Makan Minum Pendonor (Paket)				*1*	*85,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD /Operasional dalam pelayanan kesehatan*			
			Pengadaan Makan Minum Petugas (Paket)				*1*	*70,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD /Operasional dalam pelayanan kesehatan (suplemen)*			
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Labkes UTD (Paket)				*1*	*85,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD*			
			Pengadaan Reagen dan BMHP (Paket)				*1*	*500,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD*			
	1020210118	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan						75,000,000.00					Labkesda dan UTD		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara (Unit)		*0*	*0*							*Labkesda dan UTD*			
			Pemeliharaan Gedung (Paket)				*1*	*75,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD*			
	1020210119	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						50,000,000.00					Labkesda dan UTD		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara (Unit)		*0*	*0*							*Labkesda dan UTD*			
			Pemeliharaan Prasarana Kantor (Paket)				*1*	*50,000,000.00*	*(Labkesda dan UTD, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Labkesda dan UTD*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	10202102	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						27,877,141,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar (Persentase)				*80*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*80*		
			Persentase Pukesmas Yang Melaksanakan Survelens Gizi (Persentase)				*80*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*80*		
			Persentase Pukesmas Yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk (Persentase)				*459*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*46*		
			Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (Persentase)				*75*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*75*		
			Persentase Ibu Hamil Anemia (Persentase)				*108*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*108*		
			Persentase Ibu Hamil mendapatkan tablet tambah darah (Persentase)				*95*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*95*		
			Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif (Persentase)				*60*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*60*		
			Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan (Persentase)				*95*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*95*		
			Persentase remaja putri usia 12 sampai 18 Tahun di sekolah mengkomsumsi tablet tambah darah (Persentase)				*58*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*58*		
			Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (Persentase)				*39*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*39*		
			Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar (Persentase)				*85*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*85*		
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Persentase)				*86*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*86*		
			Persentase Kabupaten Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Yang Capaian Minimal Rata - rata & 80% (Persentase)				*90*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*90*		
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan (Persentase)				*97*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*97*		
			Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Orang)				*8334*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*8334*		
			Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar (Jenis)				*3*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*3*		
			Persentase Kabupaten Yang Memilki pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi (Persentase)				*75*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*75*		
			Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (Kegiatan)				*7*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*7*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Becana di fasilitas kesehatan (Persentase)				*8095*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*8095*		
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi (Persentase)				*100*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*100*		
			Persentase Puskesmas PONED dan RS PONEK (Persentase)				*493*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*493*		
			Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar (Jenis)				*7*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*7*		
			Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (Persentase)				*93*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*93*		
			Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan (Persentase)				*75*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*75*		
			Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota (Dokumen)				*1*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*1*		
			Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Persentase)				*86*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*86*		
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Persentase)				*80*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*80*		
			Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) (Persentase)				*75*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*75*		
			Angka Kejadian Malaria (Angka)				*78*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*78*		
			Persentase kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (Persentase)				*83*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*83*		
			Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi (Persentase)				*67*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*67*		
			Persentase kabupaten/kota yang memiliki â‰¥ 20% puskesmas rujukan Rabies Center (RC) (Persentase)				*83*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*83*		
			Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD & 49 per 100000 penduduk (Persentase)				*16*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*16*		
			Cakupan ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (KF lengkap) (Persentase)				*84*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*84*		
			Persentase kabupaten/kota yang mempunyai CFR DBD & 1 % (Persentase)				*83*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*83*		
			Persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor (Persentase)				*67*		*(surveilans vektor, SULAWESI BARAT)*					*67*		
			Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat (Persentase)				*100*		*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*					*100*		
			Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar (Persentase)				*33*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*33*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar (Persentase)				*33*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*33*		
			Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko (Persentase)				*50*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*50*		
			Persentase kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia (Persentase)				*50*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*50*		
			Persentase Jumlah kabupaten/kota Melaksanakan POPM Kecacingan dalam Rangka Intervensi Stunting (Persentase)				*50*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*50*		
			Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia 15 Tahun Keatas (Persentase)				*969*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*969*		
			Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di Fasilitas Kesehatan sesusai standar (Persentase)				*551*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*551*		
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja (Persentase)				*100*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*100*		
			Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Persentase)				*918*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*918*		
			Persentase Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase)				*918*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*918*		
			Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80% (Persentase)				*100*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*100*		
			Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia reproduksi (Persentase)				*95*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*95*		
			Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Persentase)				*8333*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*84*		
			Cakupan kunjungan neonatal (KN Lengkap) (Persentase)				*95*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*95*		
			Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya (Persentase)				*80*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*80*		
	102021020001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						650,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)													
			DINKES - Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (Kegiatan)				*1*	*50,000,000.00*	*(KAB POLEWALI MANDAR)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			DINKES - Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (Kegiatan)				*1*	*50,000,000.00*	*(KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (Kegiatan)				*1*	*50,000,000.00*	*(KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Pengadaan Sarana dan Prasarana Krisis Kesehatan (Paket)				*1*	*150,000,000.00*	*(Kecamatan Simboro, Kelurahan/Desa Botteng Utara, KAB MAMUJU)*							
			Mobilisasi tim penanggulangan krisis kesehatan (Paket)				*1*	*100,000,000.00*	*(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*tim penanggulangan krisis kesehatan*			
			Pengadaan Logistik Krisis Kesehatan (Paket)				*1*	*50,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penduduk terdampak krisis*			
			Peningkatan Kapasitas Emergency Medical Tim (EMT) (Orang)				*60*	*100,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Emergency Medical Tim*			
			Peningkatan Kapasitas tim Rapid Health Assesment (Orang)				*60*	*100,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tim Rapid Health Assesment*			
	102021020002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						647,500,000.00					Tim Rapid Health Assesment		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*	*500*		*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*				*Tim Rapid Health Assesment*	*0*		
			Kajian Epidemiologi (Dokumen)				*1*	*100,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Akademisi, Petugas Kesehatan*			
			On the Job Training (OJT) Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) (Kali)				*6*	*50,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas fasilitas pelayanan kesehatan*			
			Pendampingan tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Fasilitas kesehatan (Kali)				*6*	*50,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Kesehatan*			
			Penemuan kasus danidentifikasi faktor risiko melalui penyelidikan Epidemiologi (Kali)				*6*	*297,500,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*6 Kabupaten*			
			Pengadaan Logistik (Paket)				*1*	*50,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Mamuju*			
			Renkon Pemetaan Risiko Tingkat Provinsi (Orang)				*50*	*100,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas Sektor*			
	102021020003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						984,334,000.00					Lintas Sektor		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)		*0*	*0*	*12*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*				*Lintas Sektor*	*0*		
			DINKES - Orientasi Pelayanan Kesehatan Stimulasi Deteksi Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK) (Kegiatan)				*1*	*85,000,000.00*	*(Kecamatan Sarjo, Kelurahan/Desa Letawa, KAB PASANGKAYU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*(Sasaran Lokus Stunting : Majene dan Polman)*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Orientasi Pelayanan Kesehatan Stimulasi Deteksi Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK) (Orang)				*60*	*85,000,000.00*	*(Mamuju (Sasaran Lokus Stunting : Majene dan Polman), SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*(Sasaran Lokus Stunting : Majene dan Polman)*			
			Pelatihan ANC Lengkap Bagi tenaga Kesehatan (Orang)				*50*	*100,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bidan/Dokter*			
			Pelatihan Penanganan Kegawat Daruratan maternal dan Neonatal (Orang)				*150*	*150,000,000.00*	*(Mamuju (Sasaran Peserta : Kabupaten Polman, Majene, Mamuju Dan Pasangkayu), KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*(Sasaran Peserta : Kabupaten Polman, Majene, Mamuju Dan Pasangkayu)*			
			Pendampingan Kesehatan Keluarga Melalui Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Aplikasi (Orang)				*60*	*100,000,000.00*	*(Polman dan Mateng, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Kesehatan*			
			Penguatan AuditMaternal Perinatal (AMP) Terintegrasi dan Surveilans Kematian Ibu (SKI) (Kasus)				*30*	*85,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kab*			
			Rapat evaluasi semesteran kematian ibu dan anak (Kegiatan)				*1*	*349,334,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Pemegang Program*			
			Rapat Koordinasi Program (Paket)				*1*	*30,000,000.00*	*(Luar Daerah; 6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dalam dan Luar Daerah*			
	102021020004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif						50,000,000.00					Dalam dan Luar Daerah		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)		*0*	*0*	*3*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*				*Dalam dan Luar Daerah*	*0*		
			Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Orang)				*60*	*50,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Kesehatan*			
	102021020006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						2,640,666,000.00					Tenaga Kesehatan		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0*	*0*	*15*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*				*Tenaga Kesehatan*	*0*		
			DINKES - Aksi Bergizi Bagi Remaja Putri Dan Ibu Hamil (Kegiatan)				*1*	*70,000,000.00*	*(Kecamatan Pamboang , Kelurahan/Desa Pamboang, KAB MAJENE)*							
			DINKES - Aksi Bergizi Bagi Remaja Putri Dan Ibu Hamil (Kegiatan)				*1*	*50,000,000.00*	*(KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Aksi Bergizi Bagi Remaja Putri Dan Ibu Hamil (Kegiatan)				*1*	*70,000,000.00*	*(Polewali, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Orientasi Pemberian Makan Bayi dan Anak Petugas Kesehatan Dan Kader (Kegiatan)				*1*	*50,000,000.00*	*(Kecamatan Baras, Kelurahan/Desa Kasano, KAB PASANGKAYU)*							
			DINKES - Orientasi Pemberian Makan Bayi dan Anak Petugas Kesehatan Dan Kader (Kegiatan)				*1*	*60,000,000.00*	*(Kecamatan Baras, Kelurahan/Desa Balanti, KAB PASANGKAYU)*							
			DINKES - Orientasi Pemberian Makan Bayi dan Anak Petugas Kesehatan Dan Kader (Kegiatan)				*1*	*50,000,000.00*	*(Kecamatan Bambalamotu, Kelurahan/Desa Kalola, KAB PASANGKAYU)*							
			DINKES - Orientasi Pemberian Makan Bayi dan Anak Petugas Kesehatan Dan Kader (Kegiatan)				*1*	*45,000,000.00*	*(seluruh kecamatan, KAB MAMUJU)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Diseminasi data surveilans gizi (Kali)				*1*	*85,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Program*			
			Fasilitasi Pelaksanaan Surveilans Gizi (Kabupaten)				*6*	*75,000,000.00*	*(Kabupaten Se-Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Program*			
			Fasilitasi Penurunan Stunting (Paket)				*1*	*600,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil/Menyusui, Anak 0-59 Bulan, Remaja, Calon Pengantin, LP-LS*			
			Feed back pendataan berjenjang melaui koordinasi TPPS Provinsi, Kab dan Desa (Kali)				*1*	*30,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas Program dan Lintas Sektor*			
			Orientasi Konseling Menyusui Bagi Petugas Kesehatan (Kabupaten)				*6*	*85,000,000.00*	*(Kabupaten se-Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Kesehatan*			
			Orientasi Pemberian Makan Bayi dan Anak Petugas Kesehatan dan Kader (Kabupaten)				*6*	*100,000,000.00*	*(Kabupaten se-Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan dan Kader*			
			Pelatihan Pencegahan Dan Penatalaksanaan Balita Gizi Buruk (Kali)				*1*	*100,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Kesehatan*			
			Pelayanan ANC standar kepada Ibu Hamil/sosioalisasi/ orientasi / pelatihan (Kabupaten)				*6*	*100,000,000.00*	*(Seluruh Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil*			
			Pemantuan data hasil pengukuran pada balita usia 0 - 23 Bulan secara berkala (Kabupaten)				*6*	*50,000,000.00*	*(Seluruh Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*balita usia 0 - 23 Bulan*			
			Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui Sosialisasi Pemberian PMT pada ibu Hamil dan Balita (Kabupaten)				*6*	*100,000,000.00*	*(Seluruh Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil dan Balita*			
			Pendampingan dan Monitoring konsumsi Tablet Tambah Darah (Kabupaten)				*6*	*50,000,000.00*	*(Seluruh Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil, Remaja*			
			Pendampingan gizi desa lokus dengan Reqruitmen Tenaga Pendamping Gizi (Kabupaten)				*6*	*300,000,000.00*	*(Seluruh Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			Pendampingan Pencatatan Pelaporan Berbasis Aplikasi E-PPGBM Si Gizi Terpadu (Kali)				*6*	*75,000,000.00*	*(Kabupaten se-Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Pendamping Gizi*			
			Rapat evaluasi semesteran lintas sektor Kesehatan Ibu dan Anak termasuk masalah gizi (weight faultring, gizi buruk, gizi kurang, stunting) (Kali)				*2*	*465,666,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Lintas Program dan Lintas Sektor*			
			Rapat Koordinasi Program (Paket)				*1*	*30,000,000.00*	*(Luar Daerah; 6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dalam dan Luar Daerah*			
	102021020007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						324,055,000.00					Dalam dan Luar Daerah		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0*	*0*							*Dalam dan Luar Daerah*			
			Monitoring Dan Evaluasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) di Fasyankes (Dokumen)				*6*	*194,323,000.00*	*(Seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Fasilitas Pelayanan Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendampingan Kebugaran Jasmani Pada Kelompok Olahraga (Kabupaten)				*6*	*75,000,000.00*	*(Seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kelompok olahraga*			
			Tes Kebugaran ASN di Provinsi (Orang)				*100*	*54,732,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*ASN Lingkup Pemprov Sulbar*			
	102021020008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						380,000,000.00					ASN Lingkup Pemprov Sulbar		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0*	*0*	*2*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*				*ASN Lingkup Pemprov Sulbar*	*0*		
			Monitoring Dan Evaluasi Percepatan Akses Sanitasi (Kabupaten)				*6*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			Pemicuan Jamban Sehat (PJS) (Desa)				*50*	*150,000,000.00*	*(Mamuju : 8 Desa, Mateng : 12 Desa, Majene : 11 Desa, Polman : 7 Desa, Pasangkayu : 6 Desa Dan Mamasa 6 Desa, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 kabupaten*			
			Pertemuan Jejaring STBM (Orang)				*50*	*85,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan/pengelola program, sanitarian, dan sektor lain yang terkait*			
			Pertemuan LS/LP dalam rangka percepatan Akses Sanitasi (Orang)				*180*	*85,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			Rapat Koordinasi Program (Paket)				*1*	*30,000,000.00*	*(Luar Daerah; 6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dalam dan Luar Daerah*			
	102021020011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						2,590,014,000.00					Dalam dan Luar Daerah		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)										*Dalam dan Luar Daerah*			
			Assement Eliminasi Kusta (Kali)				*3*	*50,000,000.00*	*(Polman, Majene Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*3 Kabupaten*			
			Bimbingan Teknis Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Kabupaten)				*6*	*85,000,000.00*	*(Semua Kabupaten se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			Desiminasi Data PTM (Orang)				*30*	*30,000,000.00*	*(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Program*			
			Deteksi Dini Penyakit Diabetes Melitus di provinsi dan Kabupaten (Kabupaten)				*6*	*185,000,000.00*	*(Semua Kabupaten se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*6 Kabupaten*			
			Deteksi Dini Penyakit Hipertensi di Provinsi dan Kabupaten (Kabupaten)				*6*	*85,000,000.00*	*(Semua Kabupaten se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			DINKES - Deteksi Dini Penyakit Diabetes Melitus di provinsi dan Kabupaten (Kegiatan)				*1*	*70,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Kegiatan deteksi dini penyakit menular dapat mencegah penyebaran penyakit menular (Kegiatan)				*1*	*30,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			DINKES - Kegiatan deteksi dini penyakit menular dapat mencegah penyebaran penyakit menular (Kegiatan)				*1*	*30,000,000.00*	*(Kecamatan seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Kegiatan deteksi dini penyakit menular dapat mencegah penyebaran penyakit menular (Kegiatan)				*1*	*30,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Kegiatan deteksi dini penyakit menular dapat mencegah penyebaran penyakit menular (Kegiatan)				*1*	*30,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Kegiatan deteksi dini penyakit menular dapat mencegah penyebaran penyakit menular (Kegiatan)				*1*	*35,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Kegiatan deteksi dini penyakit menular dapat mencegah penyebaran penyakit menular (Kegiatan)				*1*	*50,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Kegiatan deteksi dini penyakit menular dapat mencegah penyebaran penyakit menular (Kegiatan)				*1*	*30,000,000.00*	*(Kecamatan seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Kegiatan deteksi dini penyakit menular dapat mencegah penyebaran penyakit menular (Kegiatan)				*1*	*70,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Kegiatan deteksi dini penyakit menular dapat mencegah penyebaran penyakit menular (Kegiatan)				*1*	*35,000,000.00*	*(Kecamatan Campalagian, Kelurahan/Desa Lokasi : -RT/RW 0/0, Desa dan Kelurahan,, KAB POLEWALI MANDAR)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			DINKES - Kegiatan Pelaksanaan Investigasi Kontak TBC (Kegiatan)				*1*	*50,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Pelatihan PDP (Pengobatan Dukungan Dan Perawatan) Pada ODHIV (Kegiatan)				*1*	*60,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Penyebarluasan Informasi kesehatan melalui berbagai media di Provinsi (Kegiatan)				*1*	*50,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Surveilans Faktor Resiko Kasus DBD di Kabupaten (Kegiatan)				*1*	*30,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			DINKES - Surveilans Faktor Resiko Kasus DBD di Kabupaten (Kegiatan)				*1*	*30,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			Melaksanakan Deteksi Dini Penderita TBC (Desa)				*24*	*85,000,000.00*	*(4 Desa di masing-masing Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kader;Masyarakat (Lintas Program dan Lintas Sektor)*			
			Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Pengobatan Pecegahan TBC di Fasyankes (Kali)				*12*	*50,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas kesehatan kabupaten dan Puskesmas*			
			Monitoring dan evaluasi terpadu (Kabupaten)				*6*	*30,000,000.00*	*(Semua Kabupaten se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			On The Job Traning Penguatan sistem Surveilans Malaria (e - SISMAL) di Fasilitas Kesehatan (Kali)				*1*	*50,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Program Malaria*			
			Pelaksanaan Investigasi Kontak TBC (Kali)				*43*	*100,000,000.00*	*(Kab Mamuju dan Polman, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Tenaga Kesehatan*			
			Pelaksanaan Konseling dan TesTing Pada Populasi Khusus, Kunci dan Umum (Kali)				*6*	*85,000,000.00*	*(Semua Kabupaten se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Populasi Khusus, Kunci dan Umum*			
			Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dan Kecacingan (Kali)				*4*	*50,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*4 Kabupaten*			
			Pendampingan Implementasi Penanganan Kasus Rabies (Kali)				*6*	*30,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas di Fasyankes di 6 Kabupaten*			
			Pendampingan Penguatan sistem Surveilans DBD di Fasilitas Kesehatan (Kabupaten)				*6*	*300,000,000.00*	*(Seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten*			
			Pendampingan Tata laksana pneumonia sesuai standar (Kali)				*6*	*30,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*petugas kesehatan di fasyankes*			
			Penyelidikan Epidemiologi Indikasi Kasus DBD (Kabupaten)				*6*	*50,000,000.00*	*(Seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			Penyilidikan Epidemiologi Kasus Malaria (Dokumen)				*2*	*50,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*2 Kabupaten*			
			Pertemuan Desiminasi Validasi Data TB (Kali)				*2*	*85,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas Program*			
			Pertemuan Rapat Koordinasi Lintas Program Pengendalia Penyakit (Kabupaten)				*6*	*335,014,000.00*	*(Semua Kabupaten se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Lintas Program*			
			Rapat Koordinasi Program P2 dan PTM (Paket)				*1*	*60,000,000.00*	*(Luar Daerah; 6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dalam dan Luar Daerah*			
			Supervisi Program ISPA (Kali)				*6*	*30,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten (Puskesmas)*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Supervisi Program Kusta (Kali)				*6*	*30,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan Kab Puskesmas*			
			Surveilans Vektor Pada Wilayah Berisiko Penyakit Tular Vektor (Kabupaten)				*6*	*75,000,000.00*	*(Seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Wilayah Berisiko Penyakit Tular Vektor*			
	102021020012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						50,000,000.00					Wilayah Berisiko Penyakit Tular Vektor		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)		*0*	*0*							*Wilayah Berisiko Penyakit Tular Vektor*			
			Pendampingan Jamaah Haji Ke Embarkasi (Kabupaten)				*6*	*50,000,000.00*	*(Seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jamaah Haji*			
	102021020013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						75,000,000.00					Jamaah Haji		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)		*0*	*0*							*Jamaah Haji*			
			Bimbingan Teknis ODMK (Kabupaten)				*6*	*75,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Orang dengan masalah kejiwaan*			
	102021020016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						16,445,572,000.00					Orang dengan masalah kejiwaan		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)		*0*	*0*							*Orang dengan masalah kejiwaan*			
			Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI (Tahun)				*1*	*16,345,572,000.00*	*(Dinkes Sulbar, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BPJS Kesehatan*			
			Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Kali)				*12*	*100,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola JKN di Dinkes Kabupaten*			
	102021020017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						75,000,000.00					Pengelola JKN di Dinkes Kabupaten		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Pengelola JKN di Dinkes Kabupaten*			
			Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan Epidemiologi (Dokumen)				*6*	*75,000,000.00*	*(Seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
	102021020018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota						1,135,000,000.00					6 Kabupaten		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0*	*0*							*6 Kabupaten*			
			Diseminasi Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi (Kali)				*6*	*100,000,000.00*	*(Polewali Mandar, Majene, Mamasa, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Lokus*			
			Fasilitasi Intervensi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Kali)				*6*	*100,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola SPM Kabupaten dan Puskesmas*			
			Fasilitasi Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi (Kali)				*6*	*100,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lokus Binaan*			
			Fasilitasi Penyusunan Sasaran SPM (Kegiatan)				*1*	*85,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Program Dinkes Provinsi dan Kabupaten*			
			Kalakarya (Kali)				*6*	*150,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas Program dan Lintas Sektor*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Sinkronisas (Forum OPD) (Kegiatan)				*1*	*150,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas Program*			
			Monitoring dan Evaluasi DAK (Kali)				*6*	*50,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Program Dinkes Kabupaten dan Puskesmas*			
			Monitoring dan Evaluasi SPM (Kali)				*1*	*50,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Program Dinkes Kabupaten*			
			Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Kali)				*1*	*250,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh stake holder terkait di bidang kesehatan baik Pusat, Provinsi , Kabupaten Lintas Program dan Lintas Sektor*			
			Rapat Koordinasi Program (Paket)				*1*	*100,000,000.00*	*(Luar Daerah; 6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dalam dan Luar Daerah*			
	102021020019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						155,000,000.00					Dalam dan Luar Daerah		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Dalam dan Luar Daerah*			
			Bimbingan Teknis Mutu Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dokumen)				*1*	*75,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*			
			Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan PONED dan PONEK Pada Fasilitas Kesehatan (Dokumen)				*1*	*50,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Nakes Puskemas Poned dan Ponek*			
			Rapat Koordinasi Program (Paket)				*1*	*30,000,000.00*	*(Luar Daerah; 6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dalam dan Luar Daerah*			
	102021020020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas						30,000,000.00					Dalam dan Luar Daerah		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)		*0*	*0*							*Dalam dan Luar Daerah*			
			Pelaksanaan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Pelayanan Kesehatan (Dokumen)				*1*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*FKTP*			
	102021020021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota						370,000,000.00					FKTP		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0*	*0*							*FKTP*			
			Distribusi Vaksin dan Logistik Lainnya Program Imunisasi serta Monitoring Ketersediaanya (Kali)				*6*	*50,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			Fasilitasi Cold Room (Paket)				*1*	*85,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Mamuju*			
			Investigasi dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Kali)				*6*	*75,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			Monitoring dan Pendampingan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (Kali)				*12*	*30,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak usia sekolah tingkat dasar di 6 Kabupaten*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Monitoring Imunisasi dasar Lengkap (Kali)				*6*	*50,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten dan Puskesmas terpilih*			
			Ojt Antigen Baru Program Imunisasi (Dokumen)				*6*	*50,000,000.00*	*(Seluruh Kab se Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			Rapat Koordinasi Program (Paket)				*1*	*30,000,000.00*	*(Luar Daerah; 6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dalam dan Luar Daerah*			
	102021020023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						200,000,000.00					Dalam dan Luar Daerah		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)		*0*	*0*							*Dalam dan Luar Daerah*			
			Evaluasi hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Kali)				*6*	*50,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dokter dan Perawat di Fasyankes, Pendamping*			
			Peningkatan Kapasitas Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Orang)				*35*	*150,000,000.00*	*(Makassar, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dokter dan Perawat di Fasyankes*			
	102021020025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional						75,000,000.00					Dokter dan Perawat di Fasyankes		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0*	*0*							*Dokter dan Perawat di Fasyankes*			
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional (Paket)				*1*	*75,000,000.00*	*(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lab Rujukan/Nasional*			
	102021020026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan						100,000,000.00					Lab Rujukan/Nasional		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Lab Rujukan/Nasional*			
			Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (Laporan / Dokumen)				*5*	*100,000,000.00*	*(Majene, Mamuju, Mamasa, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Wilayah Rawan Bencana*			
	102021020030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						85,000,000.00					Masyarakat Wilayah Rawan Bencana		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)		*0*	*0*							*Masyarakat Wilayah Rawan Bencana*			
			Koordinasi Penguatan Lintas Program Teknis Pengelolaan Intervensi Kunjungan Keluarga (Orang)				*100*	*85,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas Program*			
	1020210227	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						815,000,000.00					Lintas Program		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)										*Lintas Program*			
			DINKES - Pendampingan persiapan puskesmas menuju PPK-BLUD (Kegiatan)				*5*	*500,000,000.00*	*(pusekemas tampapadang, binanga, rangas, beru-beru, dan tapalang, KAB MAMUJU)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendampingan Mutu Akreditasi PKLU dan TPMD/DRG (Dokumen)				*1*	*30,000,000.00*	*(6 kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PKLU dan TPMD/DRG*			
			Pendampingan Teknis Pelaksanaan PONED dan PONEK Pada Fasilitas Kesehatan (Dokumen)				*1*	*85,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tim Poned dan Tim Ponek*			
			Pertemuan TIM Pembina TPCB (Kegiatan)				*1*	*200,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*TIM Pembina TPCB*			
	10202103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						255,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Persentase)				*1238*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*1238*		
			persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu (Persentase)				*95*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*95*		
	1020210301	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan						255,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*										
			Bimbingan Teknis Integrasi Data Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan (Kali)				*6*	*85,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Program dan Data Kesehatan Kabupaten*			
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Kali)				*6*	*85,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola SIK Kabupaten*			
			Workshop Integrasi Sistem Informasi Kesehatan (Kali)				*6*	*85,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Program dan Data SIK Kabupaten*			
	10202104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						230,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi (Persentase)				*100*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*100*		
			Persentase Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (SPA) Penunjang Sesuai Kelas (Persentase)				*493*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*493*		
	102021040001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						30,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)		*0*	*0*										
			Pengendalian dan Pengawasan Rumah Saki dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kali)				*6*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Fasyankes*			
	102021040002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						180,000,000.00					Fasyankes		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)		*0*	*0*							*Fasyankes*			
			Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi RS (Kali)				*9*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Rumah Sakit*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pertemuan Evaluasi pelaksanaan Pelayanan kesehatan rujukan terintegrasi (sisrute) (Orang)				*120*	*50,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tim Kerja Pengelolaan Sistem Rujukan dan Pelayanan Kesehatan*			
			Workshop pelaksanaan tata kelola RS (Orang)				*50*	*100,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Manajemen RS*			
	102021040003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						20,000,000.00					Tenaga Manajemen RS		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Unit)		*0*	*0*							*Tenaga Manajemen RS*			
			Monitoring Evaluasi Pelaksanaan lindikator Nasional Mutu (INM) di Faskes (Orang)				*36*	*20,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas d1 Fasyankes*			
3	**10203**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**2,005,036,600.00**							**0.00**	**Dinas Kesehatan**
			Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (Persentase)				***60***						***Petugas d1 Fasyankes***			
	10203101	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						110,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			PersentaseÂ FasilitasÂ PelayananÂ KesehatanÂ yangÂ MemilikiÂ SumberÂ DayaÂ ManusiaÂ KesehatanÂ (SDMK)Â SesuaiÂ Standar (Persentase)				*59*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*59*		
			PersentaseÂ FasilitasÂ Â KesehatanÂ Rujukan Tindak LanjutÂ Yang sumberÂ DayaÂ ManusiaÂ KesehatanÂ (SDMK)Â Memenuhi Standar (Persentase)				*50*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*50*		
	102031010001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						80,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										
			Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Nakes Tahunan (Orang)				*36*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Program Kabupaten*			
			Workshop Perhitungan Kebutuhan Nakes (Orang)				*150*	*50,000,000.00*	*(Provinsi/Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Staf Perencanaan dan SDMK DInkes Kabupaten dan Stake hildee*			
	102031010002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						30,000,000.00					Staf Perencanaan dan SDMK DInkes Kabupaten dan Stake hildee		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi (Orang)		*0*	*0*							*Staf Perencanaan dan SDMK DInkes Kabupaten dan Stake hildee*			
			Fasilitasi visitasi Rumah Sakit Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (Orang)				*18*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tim Visitasi Rumah Sakit*			
	10203102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1,895,036,600.00							-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)				*30*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*30*		
	102031020001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						1,700,036,600.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)		*0*	*0*										
			Evaluasi Pasca Pelatihan Tim Gerak Cepat Di Puskesmas, Pasca Pelatihan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dan Pasca Pelatihan Surveilans kesehatan Berbasis Epidemiologi bagi Petugas Puskesmas (Kali)				*6*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tim Gerak Cepat Di Puskesmas*			
			Pelatihan Edukasi Gizi, konseling ASI dan PMBA (Orang)				*30*	*872,689,650.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Pengelola Program Gizi KIA*			
			Pelatihan Gizi Bencana (Orang)				*35*	*249,441,650.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Tenaga Kesehatan*			
			Pelatihan Imunisasi Bagi pengelola Program Imunisasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Orang)				*30*	*100,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengelola Program Imunisasi*			
			Pelatihan Jabatan Fungsional untuk Bidang Kesehatan JF (Orang)				*30*	*50,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Kesehatan*			
			Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan (Orang)				*35*	*297,905,300.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Bidan*			
			Pelatihan Penguatan Manajemen perencanaan kesehatan daerah (Angkatan)				*2*	*100,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perencana Kesehatan Provinsi dan Kabupaten*			
	102031020002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						195,000,000.00					Perencana Kesehatan Provinsi dan Kabupaten		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Perencana Kesehatan Provinsi dan Kabupaten*			
			Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan TK Provinsi Sulawesi Barat (Laporan)				*1*	*30,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Kesehatan*			
			Pelaksanaan Ujian Kompetensi Naik Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat (Laporan)				*1*	*85,000,000.00*	*(Mamuju, KAB MAMUJU)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Kesehatan*			
			Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Di Fasilitas Kesehatan (Laporan)				*1*	*50,000,000.00*	*(Pusat/Provinsi/Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Kesehatan*			
			Rapat Koordinasi Program (Paket)				*1*	*30,000,000.00*	*(Luar Daerah; 6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dalam dan Luar Daerah*			
4	**10204**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**150,000,000.00**							**0.00**	**Dinas Kesehatan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial (Persentase)				***97***						***Dalam dan Luar Daerah***			
	10204101	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						90,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Layanan perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Yang Sesuai Standar (Persentase)				*100*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*100*		
	102041010001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK						60,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)		*0*	*0*										
			Monitoring dan pengawasan penggunaan obat rasional (POR) (Kabupaten)				*6*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengguna Obat Rasional*			
			Pengawasan dan Pengendalian Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (Sarana)				*6*	*30,000,000.00*	*(Polman dan Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan*			
	1020410102	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik						30,000,000.00					Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (Dokumen)		*0*	*0*							*Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan*			
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (Dokumen)				*1*	*30,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perdagangan Besar Farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK)*			
	10204102	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						60,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) diperedaran yang memenuhi standar (Persentase)				*100*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*100*		
	102041020001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional						30,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Sarana)		*0*	*0*										
			Pengawasan dan Pengendalian UKOT Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (Sarana)				*6*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Usaha Kecil Obat Tradisional*			
	1020410202	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik						30,000,000.00					Usaha Kecil Obat Tradisional		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik (Dokumen)		*0*	*0*	*6*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*				*Usaha Kecil Obat Tradisional*	*0*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektroni (Kegiatan)				*1*	*30,000,000.00*	*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Usaha Kecil Obat Tradisional*			
5	**10205**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**2,201,489,906.00**							**0.00**	**Dinas Kesehatan**
			Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS (Persentase)				***50***						***Usaha Kecil Obat Tradisional***			
			Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS (Persentase)				***50***						***Usaha Kecil Obat Tradisional***			
	10205101	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						1,221,489,906.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase Kab/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat (Persentase)				*50*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*50*		
	102051010001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						1,221,489,906.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)		*0*	*0*	*10*		*(Kabupaten se-Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*					*0*		
			Aksi Bergizi Bagi Remaja Putri Dan Ibu Hamil (Kabupaten)				*2*	*100,000,000.00*	*(Lokus Stunting, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Remaja Putri Dan Ibu Hamil*			
			DINKES - Penyebarluasan Informasi kesehatan melalui berbagai media di Provinsi (Kegiatan)				*1*	*45,000,000.00*	*(Kecamatan Baras, Kelurahan/Desa Kasano, KAB PASANGKAYU)*							
			DINKES - Penyebarluasan Informasi kesehatan melalui berbagai media di Provinsi (Kegiatan)				*1*	*50,000,000.00*	*(KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Penyebarluasan Informasi kesehatan melalui berbagai media di Provinsi (Kegiatan)				*1*	*30,000,000.00*	*(Kecamatan Bambalamotu, Kelurahan/Desa Kalola, KAB PASANGKAYU)*							
			DINKES - Penyebarluasan Informasi kesehatan melalui berbagai media di Provinsi (Kegiatan)				*1*	*50,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			DINKES - Penyebarluasan Informasi kesehatan melalui berbagai media di Provinsi (Kegiatan)				*1*	*30,000,000.00*	*(Kecamatan Baras, Kelurahan/Desa Balanti, KAB PASANGKAYU)*							
			DINKES - Penyebarluasan Informasi kesehatan melalui berbagai media di Provinsi (Kegiatan)				*1*	*60,000,000.00*	*(Kecamatan Seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa Seluruh Desa/Kelurahan, KAB POLEWALI MANDAR)*							
			Kolaborasi multi sektoral pengawalan peta jalan stunting (Kali)				*6*	*85,000,000.00*	*(Kabupaten Se_Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*multi sektoral*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting (Kegiatan)				*3*	*371,489,906.00*	*(Mamasa, Polman, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kader, Posyandu*			
			Pemberdayaan Mitra menjadi tenaga pengukur terampil (karang taruna, PKK, KPM,pramuka) (Kabupaten)				*6*	*100,000,000.00*	*(Lokus Stunting, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*karang taruna, PKK, KPM,pramuka*			
			Penyebarluasan Informasi kesehatan melalui berbagai media di Provinsi (Layanan)				*1*	*85,000,000.00*	*(Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Media*			
			Pertemuan Forum Germas di Provinsi dan Kabupaten (Kali)				*12*	*85,000,000.00*	*(Kabupaten se-Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kabupaten Se_Sulawesi Barat*			
			Rapat Koordinasi Program (Paket)				*1*	*30,000,000.00*	*(Luar Daerah; 6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dalam dan Luar Daerah*			
			Workshop komunikasi risiko Penurunan Stunting (Orang)				*180*	*100,000,000.00*	*(Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas Program dan Lintas Sektor*			
	10205102	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						370,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Jenis Media Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi (Jenis)				*9*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*9*		
	102051020001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						85,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)		*0*	*0*	*6*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*0*		
			Sosialisasi Promosi Kesehatan di Berbagai Tatanan (Orang)				*480*	*85,000,000.00*	*(Kabupaten Se-Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
	102051020002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						285,000,000.00					6 Kabupaten		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)		*0*	*0*	*6*		*(Kabupaten Se-Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*				*6 Kabupaten*	*0*		
			Advokasi Kebijakan PHBS/Germas di Kabupaten (Kali)				*6*	*85,000,000.00*	*(Kabupaten Se-Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			Pembinaan PHBS di Desa (Kali)				*6*	*100,000,000.00*	*(Kabupaten Se_Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Desa di 6 kabupaten*			
			Promosi Baper ASIK (Bapak Perduli ASI Eksklusif) (Kali)				*6*	*100,000,000.00*	*(Kabupaten Se_Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
	10205103	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi						610,000,000.00							-	Dinas Kesehatan
			Persentase desa yang melaksanakan UKBM (Persentase)				*50*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*50*		
	102051030001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM						610,000,000.00							-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen)		*0*	*0*	*3*		*(6 Kabupaten, SULAWESI BARAT)*					*0*		
			Jambore Kader Posyandu (Kegiatan)				*1*	*40,000,000.00*	*(Kecamatan Topoyo, Kelurahan/Desa Waeputeh, KAB MAMUJU TENGAH)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kader Posyandu*			
			Kegiatan Pelatihan PeningkatanKapasitas Seluruh Kader Posyandu (Dokumen)				*2*	*300,000,000.00*	*(Majene dan Polman, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kader Posyandu*			
			Pembinaan Desa Siaga Aktif Tingkat Provinsi (Kali)				*6*	*85,000,000.00*	*(Kabupaten Se_Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*6 Kabupaten*			
			Pembinaan Pengelolaan Posyandu (Kali)				*6*	*100,000,000.00*	*(Kabupaten Se_Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pembina Posyandu;Kader Posyandu*			
			Pendampingan Persiapan Puskesmasmenuju PPK-BLUD (Dokumen)				*1*	*85,000,000.00*	*(Kabupaten Mamuju, SULAWESI BARAT)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
	J U M L A H							**56,483,764,493.00**							-	

RENJA 2024

DINAS KESEHATAN
Provinsi Sulawesi Barat